

LAPORAN **KINERJA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LHOKSEUMAWE**



2024

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe tahun anggaran 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Sepanjang tahun 2024, KPKNL Lhokseumawe telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan searah dengan Peta Strategis KPKNL Lhokseumawe tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Lhokseumawe Tahun 2024 dengan terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lhokseumawe telah mencapai 109,42%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective* sebesar 30,23%, *Customer Perspective* sebesar 21,23%, *Internal Process Perspective* sebesar 29,01%, dan *Learning & Growth Perspective* sebesar 28,95%.

Pencapaian tersebut adalah bentuk pelayanan KPKNL Lhokseumawe kepada *stakeholder* yang selama ini berkontribusi pada penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan nilai 96,45 dari skala 100,00.

Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Lhokseumawe. Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, kami berharap laporan ini dapat berguna sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja yang telah dicapai sekaligus indikator guna meningkatkan kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Lhokseumawe, 03 Februari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe ini disusun sebagai bagian dari perwujudan prinsip akuntabilitas dan asas keterbukaan dalam praktik *good governance*. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai dokumentasi pencapaian pelaksanaan program/Rencana Kerja Tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kanwil DJKN Aceh, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selama tahun 2024, terdapat 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Lhokseumawe, dimana sebanyak 18 IKU telah memenuhi target dengan status HIJAU, 2 IKU belum memenuhi target dengan status KUNING, dan 1 IKU belum memenuhi target dengan status MERAH. Nilai Kinerja Organisasi yang dicapai adalah sebesar 109,42%. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini KPKNL Lhokseumawe yang pada tahun 2024 mendapatkan alokasi dana DIPA sebesar Rp2.296.044.000,00 dan telah teralisasi sebesar Rp 2.146.674.791,00 atau 93,49%.

Berdasarkan pada Peta Strategi *Kemenkeu-Three* KPKNL Lhokseumawe tahun 2024, terdapat 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan KPKNL Lhokseumawe yang penjabarannya dari masing-masing perspektif sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai sebesar 30,23%;
2. *Customer Persepective* dengan bobot IKU 20% tercapai sebesar 21,23%;
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai 29,01%;
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai 28,95%;



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
1.2 Sumber Daya Manusia.....	4
1.2.1 Berdasarkan Golongan	4
1.2.2 Berdasarkan Gender	5
1.2.3 Berdasarkan Pendidikan	5
1.2.4 Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	5
1.3 Sarana dan Prasarana	6
1.4 Wilayah Kerja.....	7
BAB II Perencanaan Kinerja.....	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja	12
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja.....	16
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	16
3.2 Realisasi Anggaran	65
Bab 4 Penutup	69

BAB I

Pendahuluan

1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh.

Tugas KPKNL Lhokseumawe sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Lhokseumawe menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

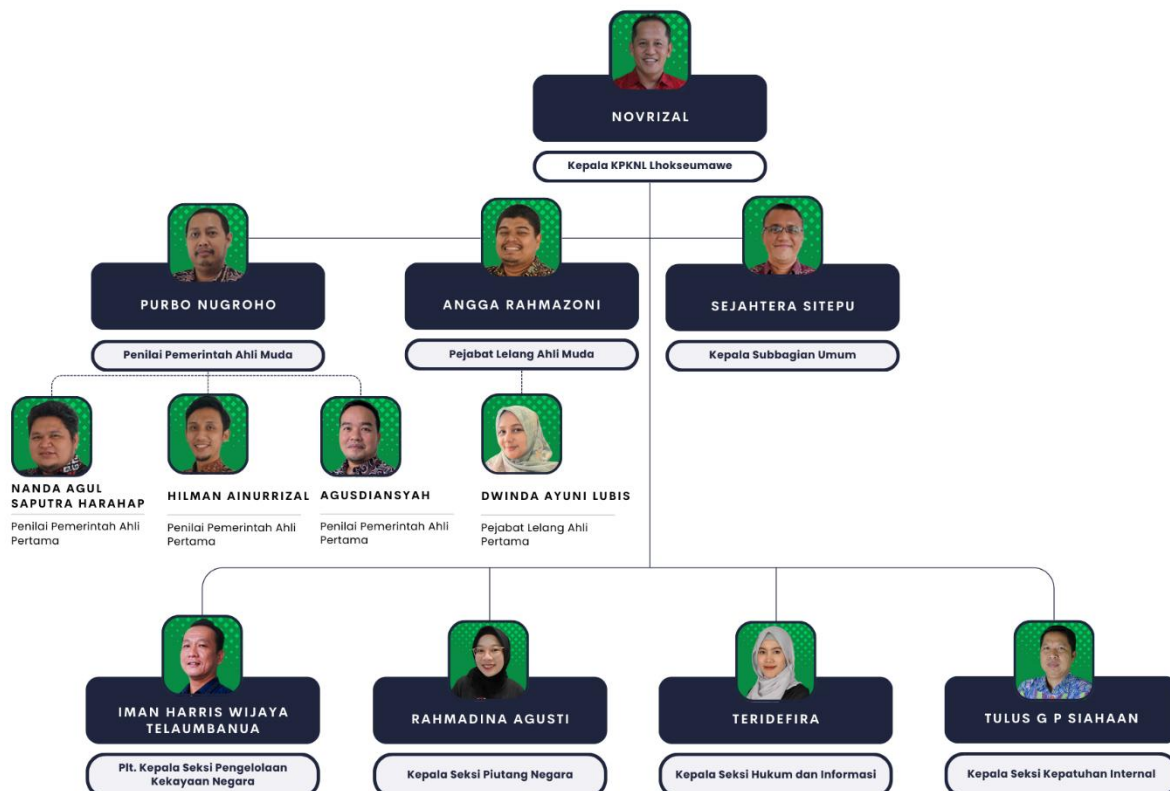
Susunan organisasi KPKNL Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang terdiri dari:
- a) Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian property dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Jabatan Fungsional Pelelang, mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. Pelelang mempunyai tugas melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe



Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Lhokseumawe periode 31 Desember 2024

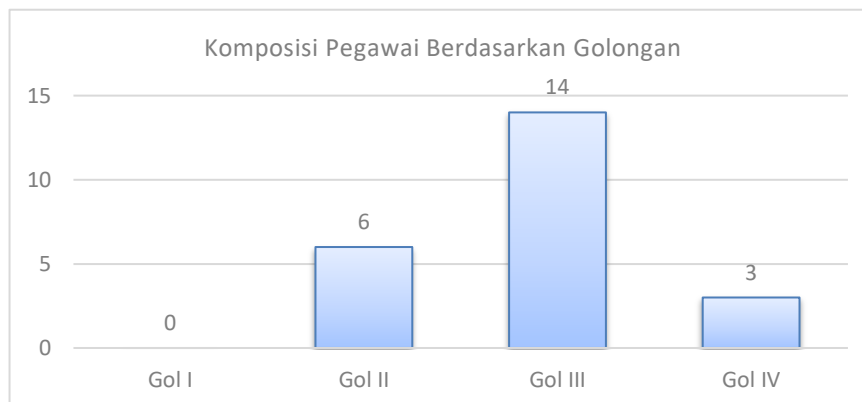
Penjelasan struktur organisasi KPKNL Lhokseumawe:

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Subbagian Umum terdiri dengan 4 (empat) pelaksana, termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dengan 3 (tiga) pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara dengan 1 (satu) pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi dengan 2 (dua) pelaksana;
6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dengan 2 (dua) pelaksana;
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri 4 (empat) Penilai dan 2 (dua) Pelelang.

1.2 Sumber Daya Manusia

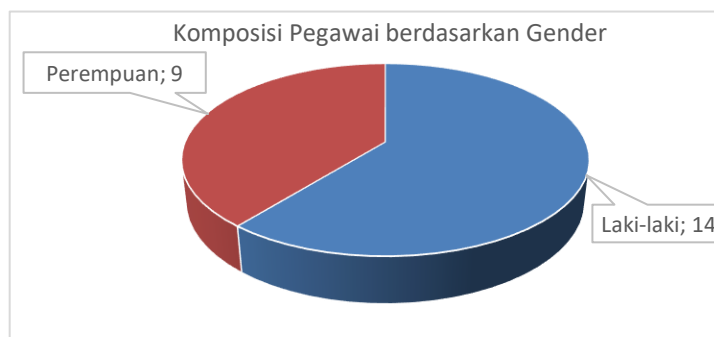
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi. KPKNL Lhokseumawe didukung oleh 23 (dua puluh tiga) orang pegawai yang bersinergi dalam melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Berikut komposisi pegawai KPKNL Lhokseumawe yang dirinci berdasarkan golongan, jabatan struktural, Pendidikan, dan Jabatan Fungsional. Berdasarkan Golongan

1.2.1 Berdasarkan Golongan



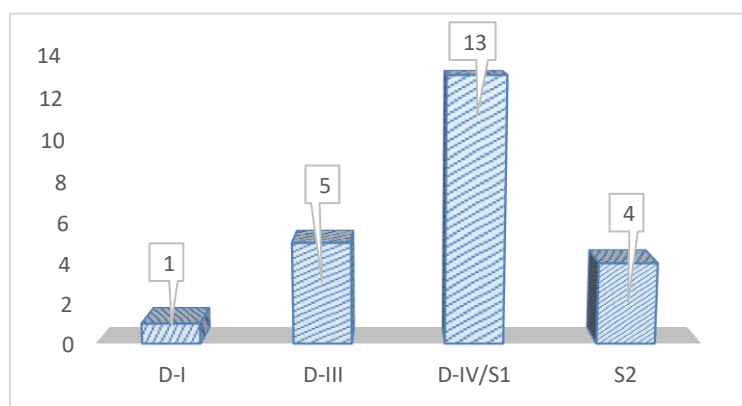
Gambar 2 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Golongan per 31 Desember 2024

1.2.2 Berdasarkan Gender



Gambar 3 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Gender per 31 Desember 2024

1.2.3 Berdasarkan Pendidikan



Gambar 4 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2024

1.2.4 Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 1 Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pelelang/Pejabat Lelang	2
2	Penilai Kekayaan Negara	4
3	Pranata Keuangan APBN Terampil	0
	Total	6

1.3 Sarana dan Prasarana

KPKNL Lhokseumawe beralamat di Jalan T Hamzah Bendahara, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. KPKNL Lhokseumawe berdiri di atas tanah seluas 1.370 m² dan Gedung kantor 2 (dua) lantai dengan total luas bangunan mencapai 1.024 m².

Prasarana kantor terdiri dari area pelayanan dan area bekerja yang dibagi menjadi beberapa ruangan sebagai berikut:

1. Area Parkir;
2. Area Pelayanan Terpadu;
3. Area Kursi Tunggu Pelayanan;
4. Ruang Bermain Anak;
5. Toilet;
6. Ruang Konsultasi;
7. Ruang E-Auction;
8. Ruang Laktasi;
9. Ruang Bendahara Penerimaan;
10. Ruang Rapat;
11. Ruang Sekretaris;
12. Ruang Kepala Kantor;
13. Gudang Arsip PKN, PN, Lelang;
14. Ruang Pelelang;
15. Mushalla;
16. Area Wudhu;
17. Dapur;
18. Ruang PJJ/Ujian;
19. Ruang Server;
20. Area Open Space;
21. Gudang Inventaris;
22. Ruang Bendahara Pengeluaran;
23. Ruang Arsip BKPN;

- 24. Aula;
- 25. Ruang Subbagian Umum;
- 26. Gudang Arsip Umum.

Sarana kantor yang mendukung langsung kegiatan pelayanan terdiri dari:

Tabel 2 Sarana KPKNL Lhokseumawe per 31 Desember 2024

No.	Sarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat	6	-	1	7
2	Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua	3	-	2	5
3	Laptop	26	-	8	34
4	Komputer	2	3	6	11

1.4 Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe mencakup daerah seluas 27.820 kilometer persegi yang meliputi 2 (dua) Kota dan 8 (delapan) Kabupaten. Adapun Kota dan Kabupaten tersebut sebagai berikut:

- 1. Kota Lhokseumawe;
- 2. Kota Langsa;
- 3. Kabupaten Bireuen;
- 4. Kabupaten Aceh Utara;
- 5. Kabupaten Aceh Timur;
- 6. Kabupaten Aceh Tamiang;
- 7. Kabupaten Bener Meriah;

8. Kabuptaen Aceh Tengah;
9. Kabupaten Gayo Lues;
10. Kabupaten Aceh Tenggara.



Gambar 5 Wilayah Kerja KPKNL Lhokseumawe

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai konsep rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, visi DJKN yaitu: “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk merealisasikan visi yang ditetapkan maka KPKNL Lhokseumawe memiliki misi yang terdiri dari:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah kekayaan Negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Seluruh visi dan misi DJKN dan KPKNL Lhokseumawe senantiasa harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi akuntabilitas, *rule of law* dan transparansi, serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang andal dalam pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Lhokseumawe untuk periode 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberikan manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Untuk mengoptimalkan implementasi manajemen kinerja di lingkungan KPKNL Lhokseumawe dilakukan penyelarasan sistem manajemen kinerja dengan sistem manajemen lainnya, seperti sistem manajemen strategis, manajemen SDM dan organisasi, serta manajemen risiko. Bentuk penyelarasan sistem manajemen yang dilakukan antara lain:

- a. Penyelarasan manajemen kinerja dengan manajemen strategis
Salah satu acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja KPKNL Lhokseumawe yaitu dokumen Rencana Strategis DJKN tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020.
- b. Penyelarasan manajemen kinerja dengan manajemen SDM dan organisasi
Implementasi manajemen kinerja dimulai dari level Kementerian dan DJKN hingga ke seluruh pegawai. Sasaran strategis, IKU, dan target organisasi diturunkan hingga ke level individu melalui proses *cascading*. Hasil penilaian kinerja kemudian digunakan untuk penataan SDM.
- c. Penyelarasan manajemen kinerja dengan manajemen risiko
Pencapaian kinerja didukung dengan implementasi manajemen risiko untuk meminimalisasi adanya kejadian yang dapat mengganggu tercapainya sasaran organisasi.

Penyelarasan Rencana Strategis DJKN dan Perjanjian Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2024 tergambar pada tabel berikut:

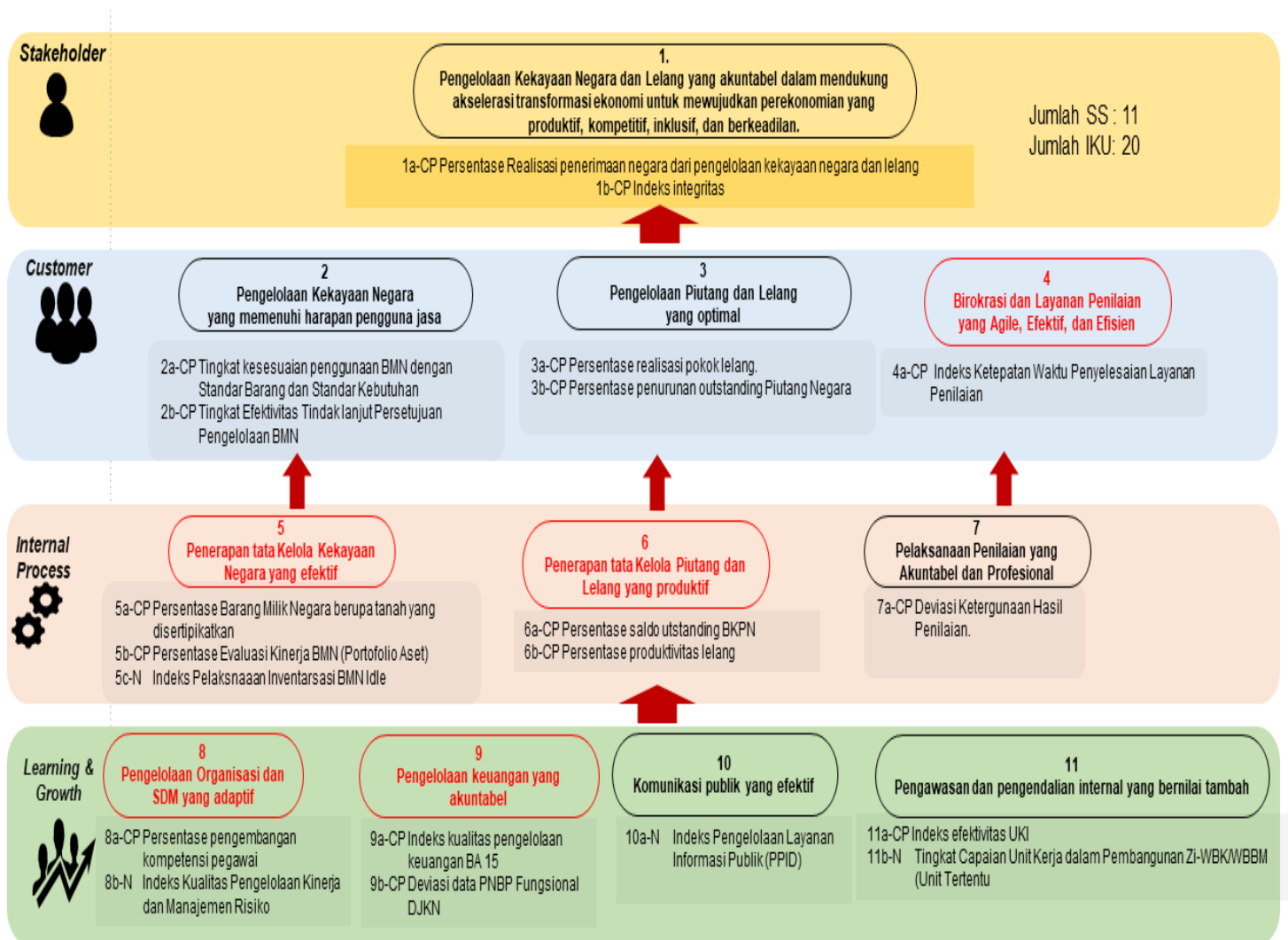
No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja KPKNL Lhokseumawe 2024	
	Indikator Kinerja	Target		Indikator kinerja	Target
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100		Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Indeks Integritas	92		Indeks Integritas Organisasi	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	70		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,50%
4	Persentase Tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	80		Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,50%
5	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	100		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
6	-	-	-	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
7	-	-	-	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatka n	100		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
9	-	-	-	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	100%
10	-	-	-	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN <i>Idle</i>	100
11	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100		Persentase Saldo <i>Outstanding</i> Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	83%* (manual baru)
12	Persentase produktivitas Lelang	34	-	Persentase Produktivitas Lelang	89%* (manual baru)

No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja KPKNL Lhokseumawe 2024	
	Indikator Kinerja	Target		Indikator kinerja	Target
13	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	26	-	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
14	-	-	-	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
15	-	-	-	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
16	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95		Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
17	-	-	-	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
18	-	-	-	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
19	-	-	-	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
20	-	-	-	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM	100%

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Lhokseumawe harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Lhokseumawe. Sasaran strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi.



Gambar 6 Peta Strategis KPKNL Lhokseumawe Tahun 2024

Peta Strategi Kemenkeu *Three* KPKNL LHokseumawe Tahun 2024 tersebut memuat 11 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama. Rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2024

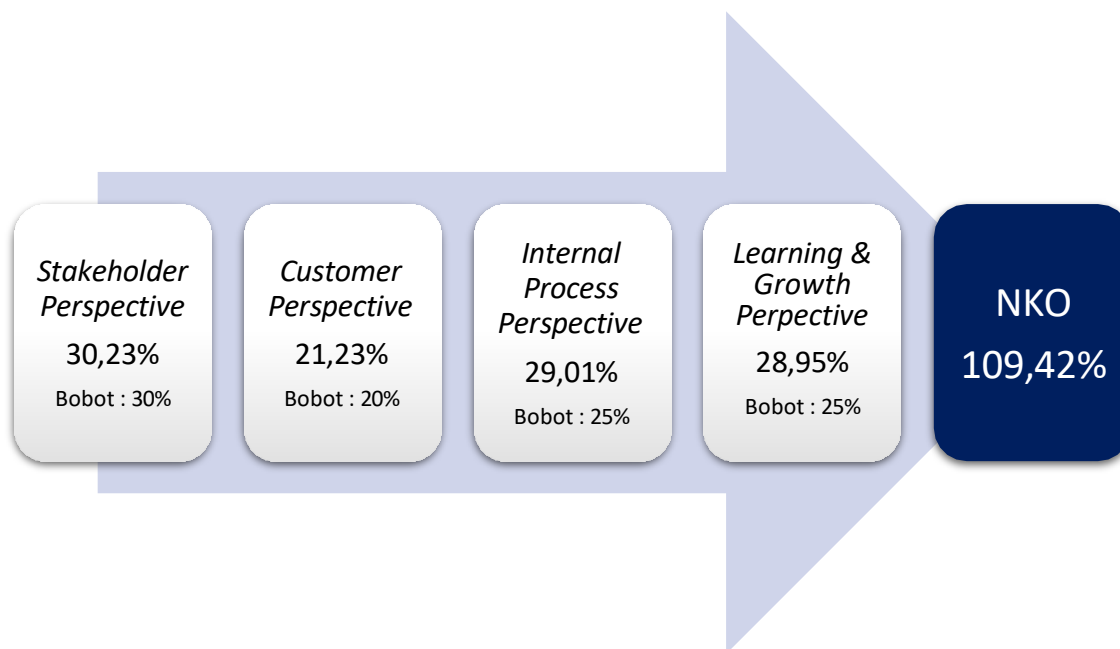
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,5%
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,5%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		3b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
4	Birokrasi dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		5c-N Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	6a-CP Persentase Saldo <i>Outstanding</i> Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	83%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		6b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-CP Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	9a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15	100
		9b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-CP Indeks Efektivitas UKI	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBBM	100%

BAB III**Akuntabilitas Kinerja****3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Lhokseumawe sesuai dengan konsep *Balance Scorecard* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lhokseumawe adalah sebesar 109,42%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada Gambar 7 berikut:



Gambar 7 Capaian Kinerja Tiap Perspektif dan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Lhokseumawe sampai dengan 31 Desember 2024

Selama tahun 2024, dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Lhokseumawe, terdapat 17 IKU telah memenuhi target dengan status capaian HIJAU, 2 IKU belum memenuhi target dengan status capaian KUNING, dan 1 IKU belum memenuhi target dengan status capaian MERAH. Berikut rincian capaian kinerja KPKNL Lhokseumawe tahun 2024:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2024

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>					30.23%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan					100.75%
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	97.84%	97.84%	97.84%
1b-CP	Indeks Integritas Organisasi	P/M	89.17	92.44	103.67%	103.67%
	<i>Customer Perspective (20%)</i>					21.23%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					115.11%
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	71.50%	82.04%	114.74%	114.74%
2b-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	86.50%	100.00%	115.61%	115.61%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal					83.39%
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	46.79%	46.79%	46.79%
3b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	P/M	100%	164.39%	164.39%	120.00%
4	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien					120.00%
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	P/M	75	100	133.67%	120.00%
	<i>Internal Process Perspective (25%)</i>					29.01%

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif					111.26%
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/M	100%	114%	113.79%	113.79%
5b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	135.71%	135.71%	120.00%
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	P/M	100	100.00	100.00%	100.00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif					116.86%
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	83%	71.61%	113.72%	113.72%
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	89%	132.70%	149.10%	120.00%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					120.00%
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	16%	0.0%	0.00%	120.00%
	<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>					28.95%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif					115.77%
8a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	120.00%	120.00%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	85	95	112%	111.54%
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel					120.00%
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100%	120.00%	120.00%	120.00%
9b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	0%	0.00%	120.00%
10	Komunikasi Publik yang Efektif					120.00%
10-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80	100	125%	120.00%
11	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					107.50%
11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	P/M	82.00	98.79	120.48%	120.00%

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM	P/M	100.00	95.00	95.00%	95.00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						109.42%

Dari capaian kinerja terhadap 20 Indikator Kinerja Kemenkeu *Three* tahun 2024 tersebut, KPKNL Lhokseumawe melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three*. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun, target addendum dan realisasi kinerja tahun 2024. Selanjutnya, berikut kami sajikan analisis dan evaluasi atas pencapaian target setiap IKU dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Lhokseumawe Tahun 2024.

1. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelolaan kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tercapainya kondisi sasaran strategis di indikasikan dari nilai indeks integritas organisasi dan kontribusi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagai berikut.

1.1 Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah

pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- PNBPN BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara.

- PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

- PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
- bea lelang batal atas permintaan penjual;
- biaya permohonan lelang;
- uang jaminan pembeli wanprestasi;
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi							
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target (Rp)	1.130.600.000 (10%)	3.391.800.000 (30%)	3.391.800.000 (30%)	6.783.600.000 (60%)	6.783.600.000 (60%)	11.306.000.000 (100%)	11.306.000.000 (100%)	Max/ TLK
Realisasi (Rp)	1.298.579.038	2.530.988.746	2.530.988.746	5.284.131.235	5.284.131.235	11.061.871.494	11.061.871.494	
Capaian (R/T)	114,86%	74,62%	74,62%	77,90%	77,90%	97,84%	97,84%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a. Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

Capaian IKU tersebut berstatus KUNING atau hampir mencapai target. Rincian detail capaian per kelompok PNBP sebagai berikut:

- Realisasi PNBP Aset sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar Rp9.279.478.403,00 sudah melebihi target yang ditentukan sebesar Rp7.700.000.000,00 (capaian 120,51%);
- Realisasi PNBP Piutang Negara sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar Rp55.780.600,00 sudah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (capaian 929,68%);

- Realisasi PNBPN Lelang sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar Rp1.726.612.491,00 masih di bawah target yang ditentukan sebesar Rp3.600.000.000,00 (capaian 47,96%).

Implikasi:

- Diperlukan rencana kerja dari seksi PKN, PN, dan Pejabat Fungsional Pelelang untuk memastikan target tahun 2025 menantang namun berpotensi untuk dapat tercapai.

b. Akar Masalah

1. Penetapan target PNBPN Pengelolaan Aset tidak berdasarkan potensi riil dari portofolio BMN yg ada pada satker di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, tetapi berdasarkan realisasi periode sebelumnya yang berasal dari hasil lelang barang rampasan Kejaksaan Negeri.
2. Capaian PNBPN tergantung pada kualitas berkas serta itikad baik dari Debitur dalam melunasi dan mencicil kewajibannya serta Peraturan terkait *Crash Program* Keringanan Utang (PMK Nomor 30 Tahun 2024);
3. Penetapan target PNBPN Lelang didasarkan pada capaian PNBPN Lelang tahun sebelumnya, dimana terdapat dua frekuensi lelang anomali dengan nilai total hampir 80 miliar rupiah.
4. Objek lelang berupa Barang Tidak Bergerak kurang *marketable*.

c. Tindakan yang Telah dilaksanakan

1. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan satuan kerja terkait penggalan potensi pemanfaatan aset dan tata caranya;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN;
3. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan BMN yang belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang;
4. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial untuk diikutsertakan dalam *Crash Program* (keringanan utang);

5. Melakukan sosialisasi terkait *Crash Program* Keringanan Utang kepada penyerah piutang, debitur, maupun masyarakat umum;
 6. Melakukan peningkatan tahapan piutang negara;
 7. Melakukan penggalian potensi lelang baik yang berasal dari BMN, BMD, perbankan, maupun lelang UMKM;
 8. Melaksanakan lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Rekomendasi Rencana Aksi
1. Melakukan pemetaan terhadap aset BMN yang berpotensi untuk dimanfaatkan;
 2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja guna penggalian potensi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset;
 3. Meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri terkait penjualan barang rampasan;
 4. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial;
 5. Melanjutkan pengelolaan piutang negara ke tahap berikutnya;
 6. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, pemerintah daerah, perbankan, maupun pelaku UMKM serta melakukan penggalian potensi lelang baik yang berasal dari BMN, BMD, perbankan, maupun lelang UMKM.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	100	100	-	97,84%

Realisasi kinerja IKU PNBPN tersebut belum memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, dengan persentase capaian 97,84% (realisasi 97,84% dari target Renstra 100%). Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU PNBPN KPKNL Lhokseumawe menyumbang 0,17% dari total PNBPN DJKN (Rp11,306 miliar dari total PNBPN DJKN Rp6.801,96 miliar).

1.2 Indeks Integritas Organisasi

1) Deskripsi Kinerja

Indeks Integritas Organisasi mengukur tingkat integritas melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal Lembaga, dan para pemangku kepentingan. Tujuan dari IKU ini adalah menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman pegawai (internal) dan pengguna layanan (eksternal), selain itu, IKU ini juga menjadi perwujudan *good governance* dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi							
	Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target						89,17	89,17	Max/ TLK
Realisasi						92,44	92,44	
Capaian						103,67%	103,67%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman baik pegawai (internal) maupun pengguna layanan (eksternal) atas persepsi dan pengalaman tentang nilai-nilai anti korupsi dan pelayanan yang diberikan dengan transparan dan akuntabel.

b. Akar Masalah

Ketidakseragaman pemahaman para pengguna layanan akan pilar-pilar integritas dan nilai anti korupsi.

c. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Peningkatan sosialisasi, diseminasi dan pembangunan integritas di lingkungan internal dan eksternal.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

Meningkatkan pengetahuan dan keseragaman pemahaman para pengguna layanan dengan melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan pembangunan integritas di lingkungan internal maupun eksternal.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	89.17	92	-	103,67%

Realisasi kinerja IKU Indeks Integritas Organisasi tersebut telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, dengan persentase capaian 100,48% (realisasi 92,44 dari target Renstra 92). Adapun realisasi IKU ini memiliki nilai yang sama dengan nilai realisasi nasional, dalam hal ini nilai realisasi komponen Survei Penilaian Integritas (SPI) di level DJKN.

2. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Sasaran strategis ini merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian bahwa pengelolaan kekayaan Negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagai berikut:

2.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

1) Deskripsi Kinerja

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar.

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar barang dan Standar kebutuhan Barang Milik Negara.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	30,00%	50,00%	50,00%	60,00%	60,00%	71,50%	71,50%	Max/ TLK
Realisasi	30,00%	56,41%	56,41%	92,61%	92,61%	82,04%	82,04%	
Capaian	100,00%	112,83%	112,83%	154,35%	154,35%	114,74%	114,74%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya:

- BMN yang menjadi objek pengukuran lokasinya sangat tersebar di berbagai wilayah;

- Terdapat BMN objek pengukuran yang secara kenyataan di lapangan sudah tidak ditemukan fisiknya;

Implikasi:

- Meningkatkan koordinasi dengan PIC satuan kerja dan melakukan konfirmasi target sebelum periode pelaksanaan pengukuran.

2. Akar Masalah

Satuan kerja tidak melakukan *update* data BMN pada SIMAN sehingga mengakibatkan BMN yang sudah dihapuskan atau yang tidak ditemukan fisiknya tetap menjadi target pengukuran.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melaksanakan koordinasi aktif dengan satuan kerja melalui berbagai media, baik terkait target pasti objek pengukuran SBSK maupun proses/hasil pengukuran SBSK.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

Meningkatkan koordinasi dengan satker terkait optimalisasi SBSK bagi objek BMN yang kesesuaian perhitungannya masih di bawah standar SBSK.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	71,50%	70%	-	114,74%

Realisasi kinerja IKU SBSK tersebut telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, dengan persentase capaian 117,2% (realisasi 82,04% dari target Renstra 70%). Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU SBSK KPKNL Lhokseumawe masih berada di bawah rata-rata capaian nasional DJKN yang memiliki nilai realisasi 86,88%.

2.2 Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

1) Deskripsi Kinerja

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

- Sewa (Surat perjanjian; SSBP; Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati)
- Kerja Sama Pemanfaatan (Surat perjanjian; SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan))
- Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (Surat perjanjian; SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan))
- Pinjam Pakai (Surat perjanjian; Berita acara serah terima)

2. Pemindahtanganan

- Penjualan (Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang; SSBP)
- Tukar Menukar (Berita acara serah terima; Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti)
- Hibah (Berita acara serah terima)

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	5,00%	45,00%	45,00%	45%	45%	86,50%	86,50%	Max / TLK
Realisasi	59,38%	59,38%	59,38%	95,35%	95,35%	100,00%	100,00%	
Capaian	1187,50%	131,94%	131,94%	211,89%	211,89%	115,61%	115,61%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya:

Isu Utama:

Belum seluruh satuan kerja memahami kewajiban penyampaian dokumen tindak lanjut atas persetujuan yang sudah diterbitkan oleh Pengelola Barang.

Implikasi:

Terdapat potensi IKU tidak tercapai maksimal.

2. Akar Masalah

Kurangnya pemahaman PIC satuan kerja dalam hal tindak lanjut persetujuan yang diterbitkan oleh Pengelola Barang.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Menjalin komunikasi dengan PIC Satuan Kerja dalam memperoleh informasi dan dokumen tindak lanjut persetujuan.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

Melaksanakan asistensi terhadap PIC Satuan Kerja terkait pentingnya tindak lanjut atas penerbitan persetujuan oleh Pengelola Barang.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	86,50%	80%	-	115,61%

Realisasi kinerja IKU tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, dengan persentase capaian 125% (realisasi 100 dari target Renstra 80). Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN KPKNL Lhokseumawe berada di atas rata-rata capaian nasional DJKN yang memiliki nilai realisasi 95,73% (capaian KPKNL Lhokseumawe lebih tinggi 4,27 poin dari capaian nasional DJKN).

3. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagai berikut:

3.1 Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseu- mawe	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K P
Target	11.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000	66.000.000.000	66.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000	Max / TLK
Realisasi	12.070.661.118	17.590.809.709	17.590.809.709	25.637.636.394	25.637.636.394	51.463.929.548	51.463.929.548	
PL I	7.864.903.518	11.015.540.009	11.015.540.009	14.548.131.094	14.548.131.094	35.330.622.848	35.330.622.848	
Pegadaian	4.205.757.600	6.575.269.700	6.575.269.700	11.089.505.300	11.089.505.300	16.133.306.700	16.133.306.700	
Capaian	109,73%	53,31%	53,31%	38,84%	38,84%	46,79%	46,79%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a. Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

Hingga akhir 2024, IKU tersebut memiliki status MERAH, dengan keterangan bahwa target belum tercapai dengan persentase capaian di bawah 50% (46,79%). Salah satu isu utama yang dihadapi adalah penetapan target pokok lelang yang didasarkan pada capaian pokok lelang tahun sebelumnya, dimana terdapat dua frekuensi lelang anomali dengan nilai total hampir 80 miliar rupiah yang tidak lagi terjadi di tahun 2024. Selain itu, terdapat cukup banyak lelang

TAP (Tidak Ada Peminat) dan lelang batal, terutama objek lelang dari perbankan.

Implikasi:

Target pokok lelang tidak dapat tercapai.

b. Akar Masalah

Target yang ditetapkan terlalu tinggi. Objek Lelang berupa Barang Tidak Bergerak kurang *marketable* yang menyebabkan potensi terjadinya Lelang TAP.

c. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melakukan penggalian potensi lelang baik yang berasal dari BMN, BMD, perbankan, maupun lelang UMKM.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, pemerintah daerah, perbankan, maupun pelaku UMKM serta melakukan penggalian potensi lelang baik yang berasal dari BMN, BMD, perbankan, maupun lelang UMKM.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	100%	100%	-	46,79%

Realisasi kinerja IKU persentase pokok lelang belum memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, dengan persentase capaian 46,79% (realisasi 46,79% dari target Renstra 100%). Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU realisasi persentase pokok lelang KPKNL Lhokseumawe menyumbang 0,10% dari total PNBPD DJKN (Rp51.463.929.548,00 dari total pokok lelang DJKN Rp48.350.825.709.612,00).

3.2 Persentase Penurunan *Outstanding* Negara

1) Deskripsi Kinerja

Penurunan *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan *outstanding* BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan
- PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan,
- penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target (Rp)	252.000.000	1.008.000.000	1.008.000.000	1.506.960.000	1.506.960.000	2.520.000.000	2.520.000.000	Max / TLK
Realisasi (Rp)	28.855.584	1.489.363.577	1.489.363.577	2.577.812.670	2.577.812.670	4.142.567.011	4.142.567.011	
Capaian	11,45%	147,75%	147,75%	171,06%	171,06%	164,39%	164,39%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a. Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun demikian, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu Jumlah *outstanding* PN yang diselesaikan lebih

banyak dibandingkan dengan penyerahan piutang baru yang diterima dari penyerah piutang

Implikasi:

Saldo/potensi *outstanding PN* cenderung semakin berkurang karena jumlah *outstanding PN* yang diselesaikan lebih banyak dibandingkan dengan penyerahan piutang baru yang diterima dari penyerah piutang.

b. Akar Masalah

Capaian penurunan *outstanding PN* tergantung pada kualitas berkas serta itikad baik dari debitur dalam melunasi dan mencicil kewajibannya serta Peraturan terkait *Crash Program* Keringanan Utang (PMK Nomor 30 Tahun 2024).

c. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial untuk diikutsertakan dalam *Crash Program* (keringanan utang).
- Melakukan sosialisasi terkait *Crash Program* Keringanan Utang kepada penyerah piutang, debitur, maupun masyarakat umum

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial.
- Melanjutkan pengurusan piutang negara ke tahap berikutnya.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	164,39%

IKU persentase penurunan *outstanding* piutang negara tidak terdapat dalam target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU penurunan *outstanding* piutang negara KPKNL Lhokseumawe menyumbang 0,06% dari total penurunan *outstanding* piutang negara DJKN (Rp4.142.567.011 dari total penurunan *outstanding* piutang negara DJKN Rp7.516.266.756.888,04).

4. SASARAN STRATEGIS: Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Penilaian yang *Agile*, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. *Customer* diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian. Sasaran Strategis ini berupaya dicapai melalui IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian, dengan detail sebagai berikut:

4.1 Indeks ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk terkait permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan

penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Perhitungan norma waktu penyelesaian penilaian mengikuti ketentuan SOP Pelayanan penilaian dengan mengacu kepada Kepdirjen Kekayaan Negara Nomor 57/KN/2023, 58/KN/2023, 59/KN/2023, dan 69/KN/2023.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien							
	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Max/ AVG
Realisasi	98,12%	103,21%	103,21%	100,43%	100,43%	100,25%	100,25%	
Capaian	130,83%	137,61%	137,61%	133,91%	133,91%	133,67%	133,67%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

2. Akar Masalah

Tidak terdapat masalah yang berarti dalam upaya pencapaian target

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan senantiasa menjaga koordinasi yang baik dengan satuan kerja/pengguna layanan.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	75%	-	-	133,67%

IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian tidak terdapat dalam target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. IKU ini secara detil juga tidak termasuk dalam target IKU nasional DJKN, namun termasuk dalam salah satu komponen yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis DJKN “Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional”.

5.SASARAN STRATEGIS: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 3 (tiga) IKU. Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut.

5.1 Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

1) Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan Amanah dari Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, yang menyatakan bahwa seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN sejak

tahun 2013 yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Tujuan utama pelaksanaan pensertipikatan Tanah BMN adalah mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Tertib Hukum, dan Tertib Fisik) dalam pengelolaan kekayaan Negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	354	708	708	1.062	1.062	1.770	1.770	Max / TLK
Realisasi	100	151	151	1.653	1.653	2.014	2.014	
Capaian	5,65%	8,53%	8,53%	92,37%	92,37%	113,79%	113,79%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya:

- Satuan Kerja belum melengkapi berkas sertipikat tanah dan terdapat BMN berupa tanah dengan status bermasalah/sengketa.
- Satuan Kerja tidak melakukan pendampingan pengukuran yang dilaksanakan oleh beberapa kantor pertanahan.
- Satuan kerja belum terlalu memahami alur delineasi tanah kategori K3 pada aplikasi Sentuh Tanahku.

Implikasi:

- Pengukuran yang tertunda menjadikan proses penerbitan sertipikat menjadi terlambat pula.
- Penyerahan berkas dan tindak lanjutnya menjadi terhambat.
- Capaian tanah kategori K3 terkendala dalam proses delineasi.

2. Akar Masalah

Target sertipikasi didominasi oleh tanah kategori K3 (tanah bermasalah dan tidak *clean & clear*). Satuan kerja target sertipikasi memiliki target yang tersebar di berbagai kabupaten sehingga penjadwalan pengukuran dan delineasi bidang tanah menjadi terhambat dan terlambat.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, Kantor Pertanahan, Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat PKKN.
- Melaksanakan monitoring secara berkala dan mencari solusi atas kendala yang muncul dalam proses penerbitan sertipikat.
- Melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada satuan kerja terkait proses delineasi bidang tanah pada aplikasi Sentuh Tanahku.
- Melaksanaan hal-hal antisipatif untuk memitigasi risiko tidak tercapainya target sertipikasi BMN berupa tanah.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, Kantor Pertanahan, Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat PKKN.
- Memastikan langkah identifikasi bidang tanah yang menjadi target telah sesuai dengan kategori seharusnya.
- Melaksanaan hal-hal antisipatif untuk memitigasi risiko tidak tercapainya target sertipikasi BMN berupa tanah.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	100%	100%	-	113,79%

Realisasi kinerja IKU persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, dengan persentase capaian 113,79% (realisasi 113,79% dari target Renstra 100%). Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan KPKNL Lhokseumawe menyumbang 3,13% dari total capaian nasional (2.014 bidang tanah dari total penyelesaian sertipikasi DJKN tahun 2024 sebanyak 64.310 bidang tanah BMN).

5.2 Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

1) Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimbingan teknis, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya.

Perhitungan capaian atas IKU ini terdiri dari 2 komponen, yaitu persentase evaluasi kinerja BMN tahun berjalan (bobot 80%) dan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja (bobot 20%).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target (evaluasi kinerja)	6	18	18	45	45	56	56	Max / TLK
Target (rekomendasi)	1	2	2	5	5	6	6	
Realisasi (evaluasi kinerja)	6	18	18	47	47	60	60	
Realisasi (rekomendasi)	2	2	2	11	11	15	15	
Capaian	15,24%	32,38%	32,38%	103,81%	103,81%	135,71%	135,71%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Hal yang menjadi perhatian antara lain mulai berlakunya SIMAN V2, dimana pelaksanaan evaluasi kinerja BMN dilakukan melalui salah satu modul dalam SIMAN V2.

2. Akar Masalah

Tidak terdapat kendala berarti dalam pencapaian target.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Melakukan pemetaan terhadap BMN target.
- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan satker terkait objek target evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).
- Melaksanakan koordinasi dengan Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN DJKN.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan pemetaan yang lebih terstruktur dalam penentuan BMN target.
- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan satker terkait objek target evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	135,71%

Realisasi kinerja IKU Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) tidak tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU Implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) KPKNL Lhokseumawe berada di atas rata-rata capaian nasional DJKN yang memiliki nilai realisasi 120%.

5.3 Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle

1) Deskripsi Kinerja

Barang Milik Negara (BMN) eks BMN *idle* adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (BMN *idle*), yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima. BMN *Idle* tersebut diinventarisasi (pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil) sesuai Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN *Idle* di Pengelola Barang guna menghasilkan Daftar Barang Pengelola yang akuntabel dan akurat. Inventarisasi dilaksanakan dengan mendaftarkan satu per satu BMN eks BMN *idle* yang dicatat dalam Daftar Barang Pengelola sekaligus melakukan pemutakhiran data terhadap identitas dan kondisi BMN terkini, baik yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang maupun dalam hal terdapat penguasaan pihak lain sehingga mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN eks BMN *Idle* yang akuntabel.

Tujuan utama IKU ini adalah memperbaiki penatausahaan BMN eks *Idle* pada Daftar Barang Pengelola sekaligus menggali potensi rekomendasi tindak lanjut pengelolaan BMN eks BMN *idle*.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	25%	55%	55%	70%	70%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	25%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100,00%	145,45%	145,45%	113,64%	113,64%	100,00%	100,00%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

2. Akar Masalah

Tidak terdapat kendala berarti dalam pencapaian target kinerja.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Melakukan inventarisasi atas BMN *Idle*.
- Melaksanakan pemutakhiran data terhadap identitas dan kondisi BMN terkini.
- Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut pengelolaan.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan inventarisasi atas BMN *Idle*.
- Melaksanakan pemutakhiran data terhadap identitas dan kondisi BMN terkini.
- Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut pengelolaan.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	100%

IKU Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN *idle* tidak terdapat dalam target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. IKU ini secara detil juga tidak termasuk dalam target IKU nasional DJKN, namun termasuk dalam salah satu komponen yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis DJKN “Pengelolaan aset yang optimal”.

6 SASARAN STRATEGIS: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut.

6.1 Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

1) Deskripsi Kinerja

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusannya dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah.

Output Piutang Negara yang telah diselesaikan yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa : 1. BKPN Lunas (SPPNL); 2. BKPN Penarikan (SPPNS); 3. BKPN Dikembalikan (SKPPN); 4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); 5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat); 6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; 7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN. Target di 2024 persentase saldo BKPN menjadi 72% dari saldo BKPN per 1 Januari 2024 pada focusPN.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	98% (152)	97% (151)	97% (151)	94% (146)	94% (146)	83% (128)	83% (128)	Min / TLK
Realisasi	100% (155)	87,74% (136)	87,74% (136)	81,29% (126)	81,29% (126)	71,61% (111)	71,61% (111)	
Capaian	98%	120%	120%	115,63%	115,63%	113,72%	113,72%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target

2. Akar Masalah

Sejak diserahkan dokumen barang jaminan sebagian besar tidak diketahui keberadaannya, tidak dikuasai oleh penyerah piutang, tidak dilakukan pengikatan, dan barang jaminan tidak *marketable*.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Melakukan konfirmasi keberadaan barang jaminan kepada penyerah piutang.
- *Asset tracing* dengan melakukan pencarian barang jaminan atau harta kekayaan lain ke pihak terkait.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengusahakan terlaksananya penyelesaian BKPN dengan melakukan penagihan dan pemeriksaan debitur di lapangan
- Optimalisasi barang jaminan yang berhasil diidentifikasi.
- Penelitian lapangan untuk mengetahui keberadaan dan atau kemampuan penanggung hutang.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	83%*	100%	-	113,72%

*Terdapat perubahan manual IKU dari Renstra DJKN

Realisasi kinerja IKU persentase penyelesaian berkas kasus piutang negara (BKPN) telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, dengan persentase capaian 113,72% (realisasi 113,72% dari target Renstra 100%). Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU persentase penyelesaian berkas kasus piutang negara (BKPN) KPKNL Lhokseumawe berada di atas rata-rata capaian nasional yang sebesar 113,45%.

6.2 Persentase Produktivitas Lelang

1) Deskripsi Kinerja

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang yang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang (lelang noneksekusi sukarela, lelang noneksekusi wajib, lelang eksekusi Hak Tanggungan, dan lelang eksekusi selain hak Tanggungan). Adapun tujuannya adalah agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/
Realisasi	136,15%	147,50%	147,50%	145,66%	145,66%	132,70%	132,70%	

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	Persentase Produktivitas Lelang							
Capaian	136,15%	147,50%	147,50%	145,66%	145,66%	149,10%	149,10%	TLK

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

b. Akar Masalah

Tidak terdapat kendala berarti dalam pencapaian target kinerja

c. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melakukan penggalian potensi lelang baik yang berasal dari BMN, BMD, perbankan, maupun lelang UMKM.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, pemerintah daerah, perbankan, maupun pelaku UMKM serta melakukan penggalian potensi lelang baik yang berasal dari BMN, BMD, perbankan, maupun lelang UMKM

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	89%*	34%	-	149,10%

*perubahan manual IKU dari Renstra DJKN

Realisasi kinerja IKU persentase produktivitas lelang telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, dengan persentase capaian 149,10% (target awal Renstra 34%, pada tahun 2023 dilakukan penyesuaian manual IKU sehingga target 2024 sebesar 89%). Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU persentase produktivitas lelang KPKNL Lhokseumawe berada di atas rata-rata capaian nasional yang sebesar 119,96%.

7 SASARAN STRATEGIS: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi satu IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut.

7.1 Deviasi Ketergunaan Hasil

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah

50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasi nya adalah 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata- rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Deviasi Ketergunaan Hasil							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun hal yang perlu diperhatikan antara lain pemohon penilaian (satuan kerja) terkadang mengajukan usulan nilai permohonan yang terlalu tinggi dibandingkan harga pasar.

2. Akar Masalah

Tidak terdapat kendala berarti dalam pencapaian target kinerja.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Memaksimalkan dan mensosialisasikan penggunaan laman SIP kepada pemohon penilaian.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

Memaksimalkan dan mensosialisasikan penggunaan laman SIP kepada

pemohon penilaian.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	16%	26%	-	200%

Realisasi kinerja IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, dengan persentase capaian berada pada nilai maksimal 200% (realisasi deviasi 0%, target Renstra DJKN 26%). Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian KPKNL Lhokseumawe berada di atas rata-rata realisasi deviasi nasional DJKN yang sebesar 0,15%.

8 SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut.

8.1 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

1) Deskripsi Kinerja

IKU ini mengukur dua komponen, yaitu Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan dan Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai (selain pimpinan unit).

Program Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Kualitas Pemenuhan Standard JP (Jam Pelatihan) bagi pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai (selain pimpinan unit) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Kriteria pemenuhan pengembangan kmpetensi adalah minimal 40 JP dalam setahun.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	54,55%	109,09%	109,09%	153,33%	153,33%	120%	120%	
Capaian	54,55%	109,09%	109,09%	153,33%	153,33%	120%	120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya:

- Minat para pegawai dalam mengikuti Diklat dikarenakan sampai dengan Triwulan I, pelaksanaan diklat masih dilaksanakan dengan Pelatihan Jarak Jauh.
- **Pegawai tidak menginput pembelajaranku di Menu Pembelajaran pada Aplikasi *E-Performance*. Baik itu kompetensi klasikal ataupun non klasikal pada kegiatan DKI per Triwulan, atau**

Implikasi:

Mempengaruhi capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.

2. Akar Masalah

- Pegawai tidak mengajukan usulan diklat secara rutin sesuai kalender

diklat DJKN

- Kurangnya minat pegawai terhadap diklat secara dalam bentuk PJJ (Pelatihan Jarak Jauh).

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Memberikan informasi mengenai Kegiatan *Soft competency* seperti *E-Learning (Open Access)* kepada seluruh Pegawai KPKNL Lhokseumawe.
- Mengingatkan para pegawai di setiap awal bulannya dalam mengajukan diklat di Aplikasi Diklat.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Memberikan informasi mengenai Kegiatan *Soft competency* seperti *E-Learning (Open Access)* kepada seluruh Pegawai agar target JP dapat tercapai.
- Menginformasikan pengajuan diklat setiap bulannya pada Aplikasi Diklat.
- Mengingatkan atasan dalam melakukan *approval* terhadap diklat pegawai pada Aplikasi Diklat DJKN.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	120%

IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai tidak terdapat dalam target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai KPKNL Lhokseumawe berada di atas rata-rata capaian nasional DJKN, dengan realisasi 120% dan realisasi nasional DJKN 117,77%.

8.2 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

1) Deskripsi Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Review pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max / TLK
Realisasi	85	85	85	93,09	93,09	94,81	94,81	
Capaian	100%	100%	100%	109,52%	109,52%	111,54%	111,54%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

- Dengan diberlakukannya KMK 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di Kementerian Keuangan terdapat pemisahan yang tegas antara pengelola kinerja organisasi dan pengelola kinerja pegawai. Hal ini berimplikasi pada pemisahan capaian organisasi dan capaian masing-masing pegawai. Pemisahan ini juga berimplikasi terhadap belum terakselerasi pada pendokumentasian kelengkapan pengelolaan kinerja.
- Dalam pengelolaan risiko, perumusan risiko dan kejadian risiko belum diformulasikan secara komprehensif.

2. Akar Masalah

- Tingkat *awareness* pegawai dan kapabilitas pengelola kinerja belum optimal

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Melaksanakan sosialisasi dan edukasi.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Pengelola kinerja organisasi dan pengelola kinerja pegawai direkomendasikan untuk mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya
- Perlunya meningkat frekuensi sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan kinerja dan organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	85	-	-	111,54%

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko tidak terdapat dalam target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. IKU ini secara detil juga tidak termasuk dalam target IKU nasional DJKN, namun termasuk dalam salah satu komponen yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis DJKN “Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif”.

9 SASARAN STRATEGIS: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut:

9.1 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1) Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Komponen yang diukur dalam IKU kualitas pengelolaan keuangan BA 015, yaitu: 1. Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4) 2. Indeks kinerja anggaran Kemenkeu yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	100	103,51	103,51	105,26	105,26	120	120	
Capaian	100%	103,51%	103,51%	105,26%	105,26%	120%	120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir

periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target seperti sampai dengan triwulan II besaran risiko berada pada level sedang. Penetapan rencana kerja yang dibuat oleh masing-masing seksi dan pelaksanaan sesuai jadwal yang sangat menentukan hasil IKPA.

2. Akar Masalah

Adanya perubahan kebijakan dan struktur anggaran (penambahan/ pengurangan).

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Monitoring berkala terkait realisasi Rencana Penarikan Dana dan Permintaan Laporan Capaian Output.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Menyampaikan permintaan Rencana Penarikan Dana ke seluruh seksi dan kelompok Jafung.
- Menyampaian nota dinas permintaan Laporan Capaian Output ke seluruh seksi dan kelompok Jafung.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	100,00	95,00	-	120%

Realisasi kinerja IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah memenuhi harapan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, dengan persentase capaian 126,31% (realisasi 120,00 dari target Renstra 95,00). Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Lhokseumawe memiliki nilai yang sama dengan rata-rata capaian nasional DJKN sebesar 120,00.

9.2 Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

1) Deskripsi Kinerja

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang PL I dan Pegadaian. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari: 1) Selisih antara pembukuan PNBP pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OMSPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi, dan 2) Selisih antara pembukuan PNBP pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OMSPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

2. Akar Masalah

Tidak terdapat kendala berarti dalam upaya pencapaian target.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Penyetoran PNBP Lelang sesuai Rincian Uang Hasil Lelang.
- Pencatatan pada FocusPN dan pembayaran dilakukan dengan teliti sehingga meminimalisir selisih.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Penyetoran PNPB Lelang sesuai Rincian Uang Hasil Lelang.
- Pencatatan pada FocusPN dan pembayaran dilakukan dengan teliti sehingga meminimalkan selisih.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	10%	-	-	200%

IKU Deviasi data PNPB fungsional DJKN tidak terdapat dalam target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. IKU ini secara detil juga tidak termasuk dalam target IKU nasional DJKN, namun termasuk dalam salah satu komponen yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis DJKN “Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel”.

10 SASARAN STRATEGIS: Komunikasi Publik yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi satu IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

10.1 Indeks pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

1) Deskripsi Kinerja

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi

publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target.

2. Akar Masalah

Tidak terdapat kendala berarti dalam pencapaian target kinerja.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Menyampaian informasi publik informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik tersedia setiap saat.

- Melaporan pengelolaan layanan informasi publik.
 - Melakukan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.
4. Rekomendasi Rencana Aksi
- Menyediakan, mengelola, dan mengumumkan informasi Publik dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	80	-	-	125,00%

IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) tidak terdapat dalam target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. IKU ini secara detil juga tidak termasuk dalam target IKU nasional DJKN, namun termasuk dalam salah satu komponen yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis DJKN “Komunikasi publik yang efektif”.

11 SASARAN STRATEGIS: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi dua IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut.

11.1 Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

1) Deskripsi Kinerja

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut: Komponen Pengungkit (komitmen pimpinan, dukungan sumber daya manusia, akses data dan informasi, dan komunikasi), Komponen Proses (pemilihan proses bisnis yang dipantau, penyusunan RCM dan *Fraud Risk*

Scenario (FRS), profiling pegawai, penyusunan program kerja, pelaksanaan pemantauan, enarikan simpulan Pengendalian Internal, dan pelaporan Pengendalian Internal), serta Komponen Hasil (penanganan pengaduan masyarakat, penyelesaian laporan informasi pada Aplikasi J3Li, dan kejadian tangkap tangan).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max / TLK
Realisasi	5	15	15	20	20	98,79	98,79	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120,48%	120,48%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

IKU tersebut sudah terlaksana dengan baik tercermin dari capaian di akhir periode yang sudah melampaui target. Namun, dalam perjalanannya terdapat dinamika dalam proses pencapaian target, diantaranya masih terdapat ketidakakuratan dan ketidakpatuhan pada proses bisnis layanan utama.

2. Akar Masalah

Tingkat *awareness* manajemen lini pertama masih perlu ditingkatkan.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

Meningkatkan *awareness* dan kompetensi lini pertama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan norma waktu dengan tetap memperhatikan kepatuhan dan akurasi dari pelaksanaan proses bisnis.

4. Rekomendasi Rencana Aksi

Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait tanggung jawab masing-masing lini pertanahan.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	82	-	-	120,48%

IKU Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) tidak terdapat dalam target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. IKU ini secara detil juga tidak termasuk dalam target IKU nasional DJKN, namun termasuk dalam salah satu komponen yang mempengaruhi tercapainya sasaran strategis DJKN “Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah”.

11.2 Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBBM

1) Deskripsi Kinerja

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM merupakan IKU baru KPKNL Lhokseumawe Tahun 2024. Adapun target dari IKU tersebut adalah sebesar 100. Realisasi atas IKU adalah sebesar 95 dari target 100. Hal ini menandakan bahwa KPKNL Lhokseumawe belum berhasil meraih gelar unit kerja ZI-WBBM.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	100	95	95	95	95	95	95	
Capaian	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1. Isu Utama dan Implikasi

Kegiatan pembangunan ZI-WBBM pada KPKNL Lhokseumawe tahun 2024 sudah melibatkan seluruh pejabat dan pegawai (baik ASN maupun PNP). Namun demikian, IKU tersebut belum berhasil dicapai dengan tingkat realisasi hingga akhir periode berstatus kuning (realisasi 95 dari target 100).

2. Akar Masalah

- Dokumen kelengkapan pembangunan ZI-WBBM masih kurang lengkap
- Habitiasi pembangunan ZI-WBBM masih belum optimal
- Pembentukan *island of integrity* dalam pembangunan ZI WBBM masih perlu ditingkatkan.

3. Tindakan yang Telah dilaksanakan

- Pembentukan tim kerja pembangunan ZI-WBBM
- Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan ZI WBBM
- Monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI-WBBM

4. Rekomendasi Rencana Aksi

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI-WBBM yang lebih berkala dan intensif
- Peningkatan internalisasi dan habituasi pembangunan ZI WBBM
- Sosialisasi dan permintaan dukungan pihak eksternal dalam pembangunan ZI WBBM guna pembentukan *island of integrity*
- Memastikan dokumen kelengkapan ZI-WBBM telah terpenuhi sesuai ketentuan.

Perbandingan realisasi kinerja KPKNL Lhokseumawe dengan Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target			% Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Standar Nasional	
2024	100	-	-	95%

IKU tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan ZI WBBM tidak disebutkan secara rinci dalam target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional, capaian IKU tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan ZI WBBM KPKNL Lhokseumawe berada di bawah rata-rata capaian nasional DJKN, dengan realisasi 95 dan realisasi nasional DJKN 116,17. Dari total 16 unit kerja yang diusulkan mengikuti penilaian ZI WBBM pada tahun 2024, terdapat 4 unit kerja yang berhasil meraih predikat tersebut. Dengan demikian, sudah terdapat 39 unit kerja DJKN yang telah meraih predikat ZI WBBM (dari total 96 unit kerja baik pusat maupun vertikal).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat berdasarkan data pada tabel berikut:

Tabel 3
Perbandingan Persentase Capaian Kinerja periode 2020 s.d 2024

No	IKU	Persentase Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	120,00%	94,14%	100,11%	120,00%	97,84%
2	Indeks Integritas Organisasi				109,39%	103,67%
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100,00%	116,49%	120,00%	120,00%	114,74%
4	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	112,90%	107,33%	106,33%	114,27%	115,61%
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	33,30%	120,00%	83,92%	106,45%	46,79%
6	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian				120,00%	120,00%
8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100,00%	101,20%	111,47%	120,00%	113,79%
9	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	120,00%	100,00%	100,00%	106,27%	120,00%
10	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle					100,00%
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	120,00%	120,00%	120,00%	103,33%	113,72%
12	Persentase produktivitas lelang	115,74%	120,00%	120,00%	108,08%	120,00%

No	IKU	Persentase Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
14	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko		120,00%	120,00%	120,00%	111,54%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	102,52%	99,40%	102,63%	103,36%	120,00%
17	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)					120,00%
19	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)				120,00%	120,00%
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM	120,00%				95,00%
NKO		101,23%	110,63%	111,30%	114,53%	109,42%

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2024, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe Tahun Anggaran (TA) 2024.

Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe TA 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	2.296.044.000,00	2.146.674.791,00	93,49%
Belanja Modal	515.603.000,00	514.904.000,00	99,86%
Belanja Pegawai	0	0	0%
Total	2.811.647.000,00	2.661.578.791,00	94,66%

Sesuai tabel di atas, persentase penyerapan anggaran di KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah 94,66% dengan nilai realisasi sebesar Rp2.661.578.791,00.

Selanjutnya, tabel berikut memberikan gambaran terkait perbandingan realisasi penyerapan anggaran KPKNL Lhokseumawe dari TA 2023 s.d. 2024. Dapat dilihat bahwa dari TA 2023 s.d. 2024, persentase realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan pada seluruh sektor belanja. Dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 terdapat peningkatan dalam realisasi belanja barang maupun belanja modal, dengan total realisasi mencapai 32,16%. Peningkatan realisasi belanja barang pada TA 2024 digunakan antara lain untuk pemeliharaan gedung/bangunan kantor, pemeliharaan gedung/bangunan mess, pemeliharaan kendaraan operasional, serta pemeliharaan sarana dan fasilitas perkantoran lainnya. Realisasi belanja modal TA 2024 mengalami peningkatan 486,8% dibandingkan realisasi TA 2023, utamanya karena terdapat belanja modal peralatan dan mesin, seperti kendaraan dinas roda empat (1 unit) serta belanja fasilitas perkantoran seperti printer, AC Split, peralatan kehumasan (*camera digital, mic wireless*), brankas, serta sarana prasara Area Pelayanan Terpadu (kursi konsultasi dan kursi tunggu APT).

Perbandingan Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe TA 2023 dan 2024

	2023		2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% peningkatan (penurunan)
Belanja Barang	2.088.662.000,00	1.926.085.637,00	2.296.044.000,00	2.146.674.791,00	11,45%
Belanja Modal	96.479.000,00	87.740.000,00	515.603.000,00	514.904.000,00	486,8%
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
Total	2.185.141.000,00	2.013.825.637,00 (92,16%)	2.811.647.000,00	2.661.578.791,00 (99,86%)	32,16%

Realisasi anggaran TA 24 adalah sebesar 94,66%, mengalami peningkatan dari persentase realisasi anggaran TA 2023 sebesar 92,16%. Peningkatan realisasi anggaran ini utamanya bersumber dari realisasi belanja modal yang terserap senilai target anggaran (99,86%).

Adapun rincian realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 serta hubungannya dengan efisiensi yang penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Keterangan
Sosialisasi dan Diseminasi (PKN, PN, Lelang)	27.497.000,00	23.734.000,00	86,31%	Target 170 orang Realisasi 463 orang
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Portofolio aset, SBSK)	67.611.000,00	62.048.356,00	91,77%	Target 1400 rekomendasi kebijakan Realisasi 1401 rekomendasi kebijakan
Pemantauan, Evaluasi, serta Pelaporan (PKN, Penilaian, Lelang, Sertifikasi)	117.137.000,00	113.294.102,00	96,72%	Target 564 rekomendasi Realisasi 2080 rekomendasi
Pelayanan publik kepada UMKM (Lelang UMKM)	40.000.000,00	35.299.466,00	88,25%	Target 20 Risalah Lelang UMKM Realisasi 28 Risalah Lelang UMKM
Pelayanan Publik Lainnya (Lelang)	19.140.000,00	18.464.700,00	96,47%	Target 259 dokumen Realisasi 474 dokumen
Pengelolaan Aset BUN (Penagihan Aset BLBI)	26.410.000,00	17.738.000,00	67,16%	Target 12 aset Realisasi 13 aset
Peraturan Lainnya (Keputusan PKN, Keputusan PN)	108.715.000,00	107.369.798,00	98,76%	Target 1400 surat keputusan Realisasi 1401 surat keputusan
Layanan Bantuan Hukum	20.640.000,00	18.853.344,00	91,34%	Target 12 layanan Realisasi 12 layanan

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Keterangan
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Perkantoran, kerumahtanggaan)	1.603.044.000,00	1.510.801.425,00	94,25%	Target 24 layanan Realisasi 24 layanan
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Peralatan fasilitas, kendaraan bermotor)	541.013.000,00	540.109.000,00	99,83%	Target 65 unit Realisasi 65 unit
Komunikasi Publik (Edukasi publik, Kehumasan)	14.410.000,00	12.367.000,00	85,82%	Target 62 orang/ kegiatan Realisasi 239 orang/ kegiatan

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target kinerja/output TA 2024 pada setiap kegiatan telah dicapai dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Kegiatan dengan tingkat efisiensi tertinggi antara lain kegiatan Pengelolaan Aset BUN (tingkat efisiensi 67,16%), kegiatan Komunikasi Publik (tingkat efisiensi 85,82%), dan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi (tingkat efisiensi 86,31%).

BAB IV

Penutup

Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPKNL Lhokseumawe sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) tersebut untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan kinerja pada KPKNL Lhokseumawe diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2024.

Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2024 secara umum hampir memenuhi seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tercermin dari kemampuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dengan NKO mencapai 109,42%. Jumlah IKU pada tahun 2024 sebanyak 20 IKU, terdapat 17 IKU yang mencapai status capaian HIJAU, 2 IKU yang mencapai status capaian KUNING (IKU Persentase Penerimaan Negara dan Pengelolaan kekayaan Negara dan Lelang serta IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam pembangunan ZI WBBM), dan 1 IKU dengan status capaian MERAH (IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang).

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Akhirnya, Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Lhokseumawe. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPKNL Lhokseumawe, serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ke depan.



DJKN

KPKNL
LHOKSEUMAWE



Layanan Informasi



0852 5996 7220



0645-631600



@kpknl_lhokseumawe



@KPKNL_Lhoksm



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe

Layanan Pengaduan



0821 6481 4600



Wise kemenkeu :
wise.kemenkeu.go.id



SP4N LAPOR :
www.lapor.go.id



Halo DJKN 150 991



Dukung kami ...

Dalam mewujudkan pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani
(ZI-WBBM)



Melayani Amanah Tanggap
Akuntabel Bermartabat Bersih
Jujur Terpercaya

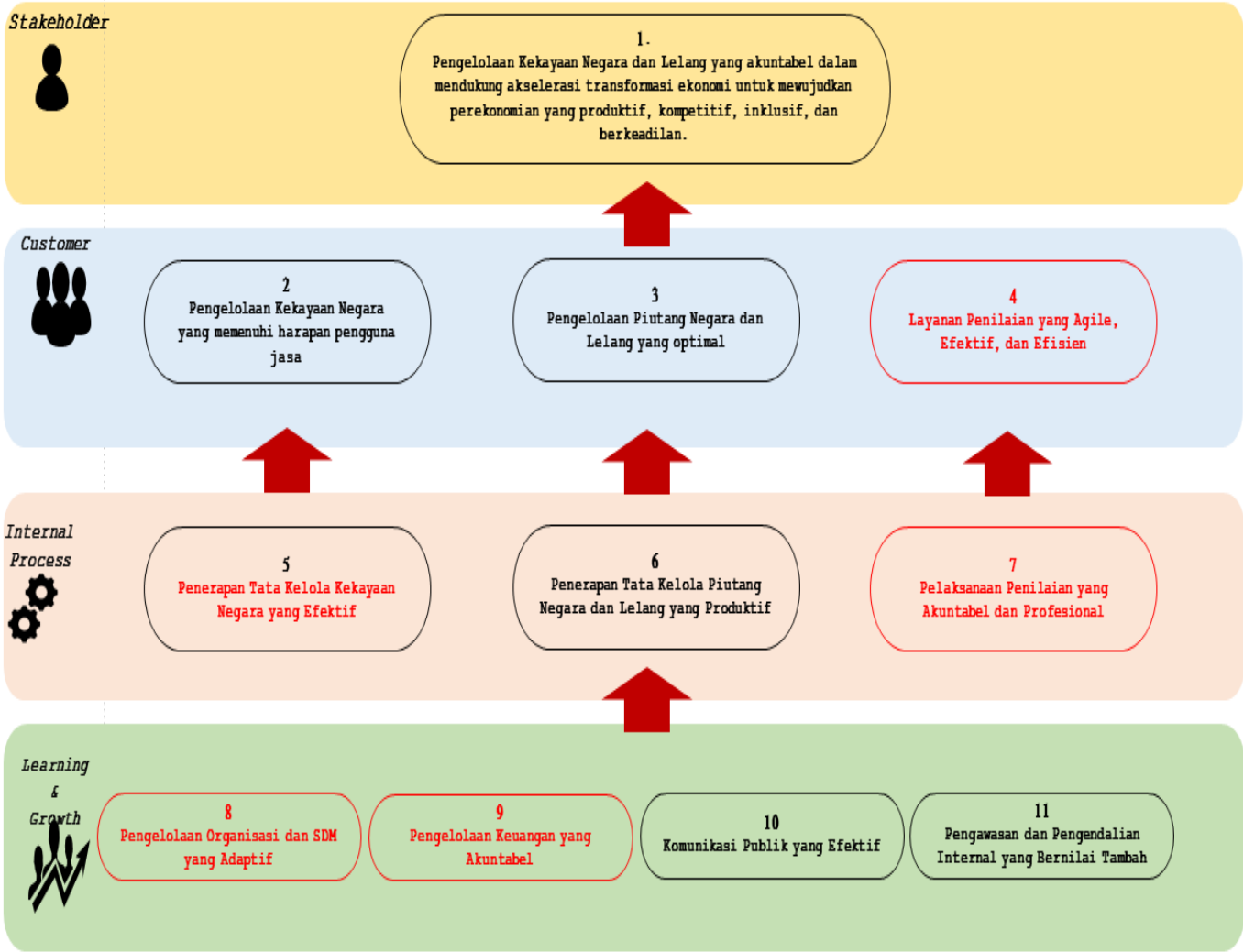
"Mantab Berjaya"





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK - 02 /WKN.01/2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG LHOKSEUMAWE
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
LHOKSEUMAWE
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp 11,3 M)
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,5%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp 110 M)
		3b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp 80 jt)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	90% (140 BKPN)
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBBM	100%

Program/Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		581.278.000
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 27.497.000
2.	Pengelolaan Aset	Rp 553.781.000

Dukungan Manajemen		Rp 2.204.295.000
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp 20.640.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.144.057.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 14.410.000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 25.188.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani Secara Elektronik
Novrizal



RINCIAN TARGET KINERJA

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

LHOKSEUMAWE

KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2024

No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	--	--	--	--	--	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	--	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	--	45%	45%	--	45%	86,5%	86,5%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%

5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	98%	97%	97%	94%	94%	90%	90%
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
8a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	--	--	--	--	--	82	82
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBBM	--	--	--	--	--	100%	100%

Jakarta, 30 Januari 2024
PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Novrizal



INISIATIF STRATEGIS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

KANWIL DJKN ACEH

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian /Presentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS)	Jumlah Aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan			
				Q3: Pelaksanaan Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Kegiatan Monitoring			

Jakarta, 30 Januari 2024

PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Novrizal



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 02A/WKN.01/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-02/WKN.01/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Semula					Menjadi				
No	Sasaran Program/Kegiatan	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Program/Kegiatan	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp80 Jt)	3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp2,52 M)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

[illegible]

Lhokseumawe, 18 September 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani Secara Elektronik
Novrizal



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
6	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp80 Jt)	<i>Penerima Layanan</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
6	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp2,52 M)	<i>Penerima Layanan</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp80 Jt)	6	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100% (Rp2,5 2 M)

Lhokseumawe, 18 September 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 02B/WKN.01/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-02/WKN.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-02A/WKN.01/2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Semula					Menjadi				
No	Sasaran Program/Kegiatan	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Program/Kegiatan	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp80 Jt)	3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp2,52 M)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

[illegible]

Lhokseumawe, 18 September 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani Secara Elektronik
Novrizal



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
6	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp80 Jt)	<i>Penerima Layanan</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
6	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp2,52 M)	<i>Penerima Layanan</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

[illegible]

Lhokseumawe, 18 September 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 02C/WKN.01/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-02A/WKN.01/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-02B/WKN.01/2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Semula					Menjadi				
No	Sasaran Program/Kegiatan	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Program/Kegiatan	Kode IKU	Indikator Kinerja	Target
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Piutang Negara	90% (140)	6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Piutang Negara	83% (128)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Piutang Negara	98%	97%	97%	94%	94%	90%	90% (140)	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Piutang Negara	98%	97%	97%	94%	94%	83%	83% (128)

Lhokseumawe, 15 November 2024

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani Secara Elektronik
Novrizal



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe tanggal 15 November 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Piutang Negara	90% (140)	Proses Bisnis
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Piutang Negara	83% (128)	Proses Bisnis

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	98%	97%	97%	94%	94%	90%	90% (140)	6	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	98%	97%	97%	94%	94%	83%	83% (128)

Lhokseumawe, 15 November 2024

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
PERIODE TRIWULAN IV
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)							30,23%	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							100,75%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	97,84%	14%	50%	97,84%	97,84%	kuning
1b-CP	Indeks Integritas Organisasi	P/M	89,17%	92,44%	14%	50%	103,67%	103,67%	hijau
	Customer Perspective(20%)							21,23%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							115,11%	
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	72%	82,04%	19%	58%	114,74%	114,74%	hijau
2b-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	P/M	87%	100,00%	14%	42%	115,61%	115,61%	hijau
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							83,39%	
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	46,79%	14%	50%	46,79%	46,79%	merah
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	164,39%	14%	50%	164,39%	120,00%	hijau
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							120,00%	
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	P/M	75%	100%	14%	100%	133,67%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							29,01%	
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							111,26%	
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertifikatkan	P/M	100%	114%	14%	33%	113,79%	113,79%	hijau
5b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	135,71%	14%	33%	135,71%	120,00%	hijau
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	P/M	100%	100,00%	14%	33%	100,00%	100,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							116,86%	
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	83%	71,61%	14%	50%	113,72%	113,72%	hijau
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%	132,70%	14%	50%	149,10%	120,00%	hijau
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
7a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16%	0,0%	14%	100%	0,00%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							28,95%	
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							115,77%	
8a-CP	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	85	95	14%	50%	112%	111,54%	hijau
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							120,00%	
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100%	120,00%	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
9b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	P/M	10%	0%	14%	50%	0,00%	120,00%	hijau
10	Komunikasi Publik yang Efektif							120,00%	
10-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80	100	14%	100%	125%	120,00%	hijau
11	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							107,50%	
11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	P/M	82,00	98,79	14%	50%	120,48%	120,00%	hijau
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBBM	P/M	100,00	95,00	14%	50%	95,00%	95,00%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								109,42%	hijau

Mengetahui,
Kepala Kantor Pelayanan,

Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal
NIP 197511301996021002



Ditandatangani secara elektronik
Tulus G.P Siahaan
NIP 19781205 200012 1 003

